

RAPAT PARIPURNA HUT KE-108 KABUPATEN SLEMAN Angka Kemiskinan dan Stunting Menurun

SLEMAN (KR) - Angka kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Sleman mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Capaian kinerja ini merupakan kerja semua pihak dalam melaksanakan program dari Pemkab Sleman.

Bupati Sleman Kustini mengatakan, sekarang ini angka kemiskinan di Kabupaten Sleman turun 0,22 persen menjadi 7,52 persen. Sedangkan untuk angka stunting menurun 2,37 persen dibandingkan pada tahun 2023.

"Angka stunting saat ini 4,51 persen. Hasil ini merupakan berkat kerja sama semua pihak yang telah sama-sama mendukung dari program Pemerintah Kabupaten Sleman," kata

Bupati saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka Hari Jadi ke-108 Kabupaten Sleman, Rabu (15/5).

Sedangkan Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta SIP mengatakan, pada peringatan Hari Jadi ke-108 Kabupaten Sleman tahun ini berkomitmen untuk bekerja lebih optimal sesuai dengan tugas, peran serta tanggungjawab masing-masing. Utamanya dalam menurunkan angka kemiskinan,

penanganan masalah sosial, pengangguran dan kenakalan remaja yang masih terjadi di kalangan masyarakat Sleman.

"Kami mendorong eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Hal itu dalam rangka mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera," kata Haris.

Ditambahkan, sebentar

lagi Kabupaten Sleman akan menggelar pemilihan kepala daerah. Pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat selalu menciptakan suasana kondusif dan saling mengayomi.

"Kami minta semua masyarakat dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu memiliki semangat menyatukan tekad untuk kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Sleman," pesan Haris. (Sni)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan
Bupati Kustini dan Wabup Danang Maharsa beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman usai rapat paripurna Hari Jadi ke-108 Kabupaten Sleman.

Bantul Tak Ada Paslon Independen

BANTUL (KR) - Sampai dengan hari kelima atau Minggu (12/5), dari jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon Bupati perseorangan yang dibuka sejak 8 Mei 2024 tidak ada satupun masyarakat atau tokoh masyarakat yang menyerahkan dukungan Calon Perseorangan.

Sebelumnya pada 5 Mei 2024 KPU Bantul mengemukakan melalui media masa cetak dan medsos KPU, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 55.656 dukungan dan tersebar di 9 kapanewon.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul, Mestri Widodo, menjelaskan sebenarnya KPU Bantul sudah sejak bulan April 2024 menyampaikan informasi mengenai jenis formulir yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan.

Pihaknya juga membuka helpdesk dan hotline pencarian perseorangan di Kantor KPU Bantul setiap hari senin-minggu dari jam 08.00-16.00, namun tidak ada satu pihakpun yang berusaha menghubungi atau menanyakan syarat-syarat pemenuhan dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

Sementara ada Ketua KPU Bantul, Joko Santosa, menyampaikan bahwa pada hari minggu pukul 23.59, KPU Bantul menutup penyerahan dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2024 dan dinyatakan Nihil untuk bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Bantul. (Jdm)

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

**Kesadaran Penduduk Kab. Sleman
Memiliki Dokumen Kependudukan
Tahun 2023 Belum Optimal:**

Akta Kelahiran Seluruh Penduduk: 61,93%, Akta Kelahiran Penduduk Usia <18 Tahun: 98,76%,
KTP Elektronik: 98,39%, KIA: 82,88%, Akta Nikah / Akta Perkawinan: 88,38%,
Akta Perceraian: 81,78%

**AYO TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN!
SUKSESKAN GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)
DAN GERAKAN PEMUTAKHIRAN DATA KARTU
KELUARGA (GAPURA DATUK)**

MAKLUMAT PELAYANAN

- Kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Kami bersedia menerima sanksi jika tidak menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- Kami akan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai Standar Pelayanan.

Semua pelayanan adminduk tidak dipungut biaya **Gratis**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 2 Tahun 2023 adalah 85,60 (Baik)

dukcapil.slemkab.go.id @dukcapilsleman capil sleman

INTERNALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Masyarakat Urus Tanah Jangan Lewat Perantara



KR-Endar Widodo

Santoso C SH MKn bersama narasumber dari Ombudsman dan UGM Yogyakarta.

WONOSARI (KR) - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Santoso C SH MKn mengatakan, seluruh pegawai baik PNS, P3K, PPN dan ASK selalu konsisten menjaga komitmen membangun budaya antikorupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, menamakan sifat-sifat kejujuran dalam setiap aspek pelayanan, baik dalam bidang keuangan dan administrasi. Agar tidak ada satupun

kasus korupsi dan gratifikasi.

Hal tersebut dikatakan dalam Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK di Hotel Santika, Wonosari, Rabu (15/5).

Dalam kesempatan ini menampilkan dua narasumber, Ketua Perwakilan Ombudsman RI DIY Budi Masthuri SH MSi dengan materi Inovasi Pelayanan Publik dan Pradhikna Yurnik Nurhayati MPA (Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM) menyampaikan materi Citizen Charter untuk Pelayanan Publik yang Lebih baik.

Menurut Santoso, zona Integritas, dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan melihat kepuasan konsumen. Adapun makna integritas, adalah jujur, mandiri, adil, bertanggungjawab, peduli, disiplin, kerja keras dan sederhana yang harus tercermin dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Terus bersemangat melakukan pelayanan prima, membuat inovasi-inovasi.

Sementara kepada masyarakat diminta untuk melakukan pengurusan tanah langsung ke kantor Pertanahan, jangan lewat perantara, agar tidak ada beban-beban tambahan. (Ewi)

KULONPROGO BANYAK POTENSI

Mengadopsi Inovasi dari Kota Madiun



KR-Widiastuti

DPRD Kulonprogo dan Pemkot Madiun tukar cenderamata.

PENGASIH (KR) - Banyak yang bisa diadopsi dari inovasi Kota Madiun agar bisa diterapkan di Kabupaten Kulonprogo. Kota Madiun awalnya tidak punya potensi wisata, tetapi bisa menjadi kota yang diampiri atau disinggahi, sementara Kulonprogo potensi wisatanya sangat luar biasa. Kemudian Kota Madiun disulap,

sehingga kalau malam menjadi ramai dan pada akhirnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga hidup.

Kota Madiun juga mampu mengangkat UMKM yang sempat terpuruk saat Covid. Pemkot berinovasi membuat lapak di masing-masing kalurahan dengan diback-up dari anggaran kalura-

han untuk meningkatkan perekonomian, dan yang berjualan adalah warga sekitar. Tidak ada pungutan retribusi dengan usaha yang dilakukan UMKM di masing-masing kalurahan.

Ditambahkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kulonprogo Istana SH MIP, salah satu yang bisa diterapkan dari Kota Madiun ke Kulonprogo salah satunya adalah kerja kolaboratif, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling mendukung, tidak malah balapan.

"Kita punya dana keistimewaan (danais) luar biasa, tetapi antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata saling balapan, tidak pernah bisa akur. Kerja kolaboratif adalah modal penting," ucapnya. (Wid/Rul)

152 WISUDAWAN DIWISUDA

Poltekkes Yoga Dukung Percepat Transformasi Kesehatan

SLEMAN (KR) - Sebanyak 152 wisudawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diwisuda, Rabu (15/5). Diharapkan para wisudawan ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) sehingga nantinya dapat mendukung percepatan transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Dr Iswanto SPd MKes mengatakan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini merupakan kampus nusantara karena mahasiswanya berasal dari 34 provinsi. Setelah lulus, mayoritas wisudawan akan kembali ke daerah asalnya untuk memenuhi kebutuhan nakes.

"Sekarang ini kebutuhan nakes di Indonesia cukup tinggi. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ikut bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan nakes. Harapan kami, lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat menutupi kekurangan nakes di wilayahnya. Sehingga nanti dapat mempercepat program transformasi kesehatan yang telah digagas oleh Kementerian Kesehatan," kata Iswanto dalam Wisuda ahli madya dan sarjana terapan kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ke-41 serta pelantikan



KR-Saifullah Nur Ichwan

Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Dr Iswanto SPd MKes saat mewisuda wisudawan terbaik.

profesi Tahun 2024.

Dari sebanyak 152 wisudawan yang terdiri dari Program D3 1 wisudawan, Sarjana Terapan 131 wisudawan dan Pendidikan Profesi sejumlah 20 wisudawan. Untuk lulusan terbaik Program Sarjana Terapan diraih Devika Tri Utami dengan IPK 3,85 dan Program Pendidikan Profesi diraih Dwi Ayu dengan IPK 4.00.

Dikatakan Iswanto, tantangan bagi lulusan di dunia medis adalah menyelaraskan antara kebutuhan dan kualitas. Dimana sekarang ini kebutuhan medis harus mempunyai spesifik dan mampu mengikuti perkembangan teknologi alat-alat kesehatan. "Jadi sekarang ini tenaga media harus memiliki spesifik dan mampu beradaptasi dengan teknologi alat-alat kesehatan. Dan

sejak di perkuliahan, wisudawan sudah mengarahkan kesitu. Kami minta wisudawan terus menambah pengetahuan dan keterampilannya," pintanya.

Sementara Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI drg Arianti Anaya MKM menuturkan, berdasarkan SISDMK per Maret 2024 ini, dari 10.217 Puskesmas yang ada di Indonesia, 48, % atau 4.908 Puskesmas belum terpenuhi ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan. Untuk mengatasi isu kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. "Pol-

tekkes Kemenkes Yoga termasuk para wisudawan berperan besar dalam mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan, khususnya transformasi SDM Kesehatan," kata Arianti.

Pelaksanaan Transformasi Kesehatan diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut mendukung transformasi SDM Kesehatan dengan mengatur percepatan penyediaan tenaga kesehatan tanpa mengurangi kualitas. Kemudahan-kemudahan sistem diberikan tanpa mengurangi peran, tanggung jawab dan kewenangan individu.

"Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup. Dengan adanya regulasi baru terkait registrasi dan perizinan ini, tenaga kesehatan tidak perlu berulang kali memperpanjang STR. Tapi dalam melakukan dan menjaga praktik yang berkualitas, tenaga kesehatan harus mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku untuk lima tahun dan dapat diperpanjang," pungkasnya. (Sni)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan

Arianti Anaya saat memberi sambutan dalam wisuda ahli madya dan sarjana terapan kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ke-41.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Dr Iswanto SPd MKes saat mengambil sumpah profesi para wisudawan.